



# **BAPENDA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM**

## **SOP PEMBUKUAN**

**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 Fax. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

**B A T A M**

***STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)***

**VERIFIKASI PIUTANG PAJAK**


NOMOR : 6874/000.8.3.3/VII/2024



**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 6874 /000.8.3.3/VII/2024
Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi	: 01 JULI 2024
Tanggal Pengesahan	: 01 JULI 2024
Disahkan oleh	<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM</b>  <b>RAJA AZMANSYAH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	<b>SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK</b>

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara</li><li>4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan piutang pajak</li><li>5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</li><li>7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 194 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah</li><li>8. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)</li><li>9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SLTA/Diploma/Strata</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li><li>3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Verifikasi Piutang</li><li>2. Berita Acara Verifikasi Piutang</li><li>3. Surat Keputusan Penetapan Pajak PBB dan Pajak Reklame</li><li>4. SOP Surat Keluar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan</li><li>2. Laporan Piutang Tahunan</li><li>3. Laporan Verifikasi Piutang</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang



SOP VERIFIKASI PIUTANG PAJAK

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan verifikasi Pembayaran Pajak Daerah, memeriksa dan mendistribusikan Berkas Piutang Pajak Daerah				a. Data Pemohon/WP b. Bukti Bayar Asli. c. Laporan Piutang Pajak Daerah	7.5 Jam	Verifikasi Data dan Berita Acara Verifikasi	
2	Melakukan verifikasi berkas dan membuat Berita Acara Verifikasi berkas Permohonan Piutang Pajak Daerah				Verifikasi Data dan Berita Acara Verifikasi	7.5 Jam	Potensi dan Kualitas Piutang	
3	Melakukan Validasi Berkas Piutang Pajak Daerah				Potensi dan Kualitas Piutang	7.5 Jam	a. Berita Acara Verifikasi b. Berkas Permohonan	
4	Melakukan pemutakhiran Data Piutang ke sistem berdasarkan Berita Acara Verifikasi yang sudah di Validasi				a. Berita Acara Verifikasi b. Berkas Permohonan	30 Menit	Validasi Data Piutang Pajak Daerah	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM

**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701120 200003 1 009





**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

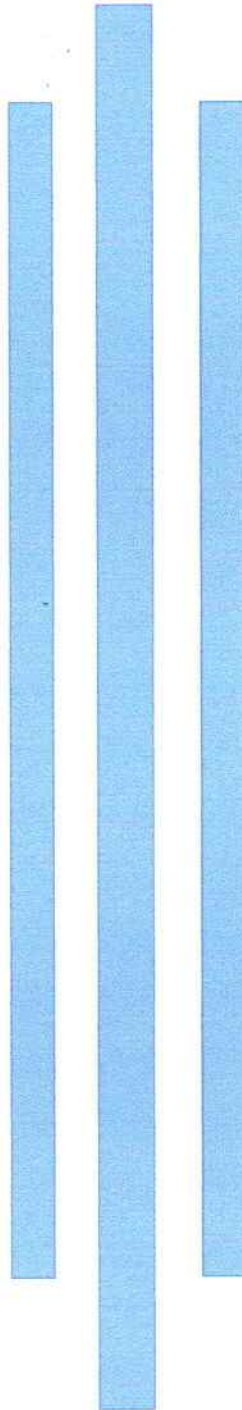
Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

**BATAM**

**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**REKONSILIASI PAJAK DAERAH**

NOMOR : 6877/000.8.3.3/VII/2024



**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP : 6877 /000.8.3.3/VII/2024  
Tanggal Pembuatan : 20 FEBRUARI 2024  
Tanggal Revisi : 01 JULI 2024  
Tanggal Pengesahan : 01 JULI 2024  
Disahkan oleh :

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM**

**RAJA AZMANSYAH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19701120 200003 1009

Nama SOP : **REKONSILIASI PAJAK DAERAH**

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
6. Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
7. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Kota Batam
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Reklame
9. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)
10. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik
11. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda

**Kualifikasi Pelaksana**

1. SLTA/Diploma/Strata
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki pengetahuan bidang Perpajakan

**Keterkaitan :**

1. BPKAD
2. Bank Kasda dan Rekening Operasional Pemko Batam
3. SOP Pengarsipan

**Peralatan/Perlengkapan :**







1. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
2. Rekening Koran KASDA dan Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam
3. Data Ketetapan PBB-P2
4. Data Sistem Simapatda, POSPBB, dan EBPHTB

**Peringatan :**


Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak Akuntabel.

**Pencatatan dan Pendataan :**

Laporan Rekonsiliasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah

 <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		000.8.3.3/VII/2024	Tanggal Efektif : 01 JULI 2024	Halaman : 1/1				
<b>SOP SOP REKONSILIASI PAJAK DAERAH</b>								
No	Uraian Prosedur	Mutu Baku						Keterangan
		Staff	Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Pajak Daerah dari BPKAD, Bank Kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam				Berkas pendukung rekonsiliasi	30 menit	Bukti Bayar/SSPD, Data ketetapan PBB-P2, Rekening Koran kasda, Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam, data sistem Simapatda, data sistem POSPBB, dan data sistem EBPHTB	
2	Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan Pajak Daerah				Bukti Bayar/SSPD, Data ketetapan PBB-P2, Rekening Koran kasda, Rek. Operasional Penerimaan Pemko Batam, data sistem Simapatda, data sistem POSPBB, dan data sistem EBPHTB	7.5 Jam	Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah	
3	Menerima, memeriksa dan menandatangani Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah, jika ada kekeliruan dikembalikan ke Staff				Draft Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah	60 menit	Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	
4	Menerima Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah				Laporan Rekonsiliasi Pajak Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak Daerah	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah	
5	Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah ke BPKAD				Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Daerah	15 jam	Tanda terima	

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM**

  
**RAJA AZMANSYAH**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19701120 200003 1 009





**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam Telp. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

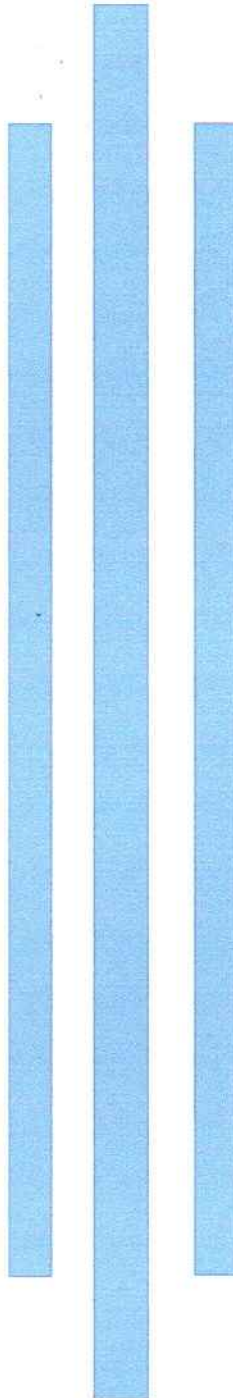
**B A T A M**

---

***STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)***


**REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR: *6673*/000.8.3.3/VII/2024



**TAHUN 2024**



 <p><b>PEMERINTAH KOTA BATAM</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p>	<b>No. SOP</b> : 6878/000.8.3.3/VII/2024
	<b>Tanggal Pembuatan</b> : 20 FEBRUARI 2024
	<b>Tanggal Revisi</b> : 01 JULI 2024
	<b>Tanggal Pengesahan</b> : 01 JULI 2024
	<b>Disahkan oleh</b>
	<p style="text-align: center;"><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KOTA BATAM</b></p>  <p style="text-align: center;"><b>RAJA AZMANSYAH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009</p>
<b>Nama SOP</b> : SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH	
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>4. Peraturan Walikota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>5. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah secara Elektronik</li> <li>6. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA/Diploma/Strata</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> </ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. BPKAD</li> <li>2. Bank Kasda</li> <li>3. OPD Penghasil</li> <li>4. SOP Pengarsipan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Setoran Pajak/Retribusi Daerah (SSPRD)</li> <li>2. Rekening Koran KASDA</li> </ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan Laporan yang tidak Akuntabel.	Laporan Realisasi Penerimaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi



SOP REKONSILIASI RETRIBUSI DAERAH

No	Uraian Prosedur	Staff	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pendukung rekonsiliasi Retribusi Daerah dari BPKAD, Bank Kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam				Berkas pendukung rekonsiliasi	30 menit	Bukti Bayar/SSPRD, Rekening Koran kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam	
2	Melakukan proses rekonsiliasi penerimaan Retribusi Daerah dengan OPD Penghasil				Bukti Bayar/SSPRD, Rekening Koran kasda, dan Rekening Operasional Penerimaan Pemko Batam	7.5 Jam	Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi	
3	Menerima, memeriksa, dan menandatangani Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi, jika ada kekeliruan dikembalikan ke Staff				Draft Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah	60 menit	Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional terkait	
4	Menerima Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani Kepala Sub Bidang Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah				Laporan Rekonsiliasi Retribusi Daerah yang telah ditandatangani oleh Pejabat Fungsional terkait	30 menit	Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi Daerah	
5	Mendistribusikan Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi ke OPD Penghasil				Berita Acara Rekonsiliasi Retribusi Daerah	7.5 Jam	Tanda terima	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM

RAJA AZMANSYAH

Pembina Utama Muda  
NIP. 19701120 200003 1 009



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

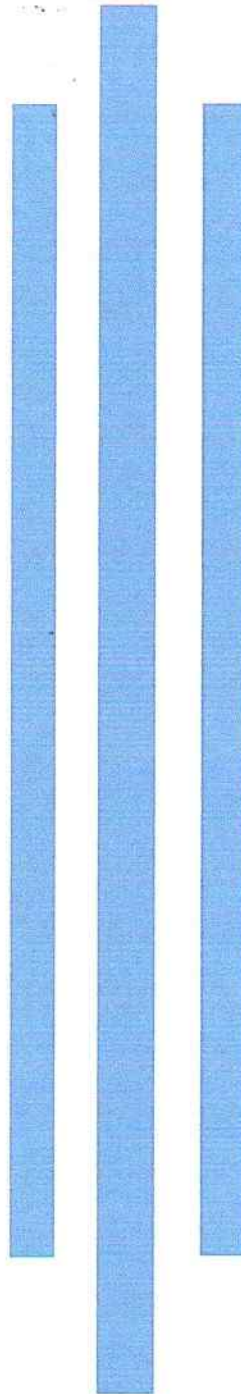
**B A T A M**

---

***STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)***



**PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN**

NOMOR : ~~87~~/000.8.3.3/VII/2024




**TAHUN 2024**



 <p><b>PEMERINTAH KOTA BATAM BADAN PENDAPATAN DAERAH</b></p>	No. SOP	: 6874/000.8.3.3/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2024
	Tanggal Revisi	: 01 JULI 2024
	Tanggal Pengesahan	: 01 JULI 2024
	Disahkan oleh	<p><b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM</b></p>  <p><b>RAJA AZMANSYAH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009</p>
Nama SOP	<b>SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN</b>	
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>3. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>4. Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>5. Peraturan Walikota Batam Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pajak Barang dan Jasa tertentu</li> <li>6. Peraturan Walikota Batam Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA/Diploma/Strata</li> <li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan</li> </ol>	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data Piutang diatas 5 tahun</li> <li>2. Penerbitan STPD</li> <li>3. Penagihan Pajak Daerah atas Utang Pajak</li> <li>4. Rekomendasi KPKNL untuk Wajib Pajak yang sudah dilakukan penyitaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Pemasangan Spanduk Peringatan</li> <li>2. Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluausa</li> <li>3. Juru Sita dan Pihak KPKNL</li> <li>4. Surat Pengajuan Penetapan pelaksanaan Lelang</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan	



 <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		6876 / 000.8.1.3.5/10/2024 Tanggal Edisi: 01 JULI 2024						Halaman : 1/1				
<b>SOP PEMASANGAN SPANDUK DAN PENYITAAN</b>												
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku				
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Pintang	Kepala Bidang Pembinaan Pendapatan Daerah	Pihak Ketiga/Kejaksanaan Negeri	Tim Pemasangan Spanduk	Juru Sita	KPKNL	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Monitoring pembayaran piutang pajak daerah								Data Pembayaran Piutang Pajak Daerah	Setiap hari kerja	Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	
2	Memberikan laporan rekapitulasi data pembayaran piutang pajak kepada Kepala Bidang								Rekapitulasi data pembayaran piutang pajak daerah	1 Jan	Arahan Pimpinan	
3	Jika belum melakukan pembayaran piutang pajak daerah akan diberikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah								Surat Pemberitahuan	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan	
4	Jika iya Wajib Pajak melakukan pembayaran maka wajib pajak mengikuti Prosedur Pembayaran								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
5	Jika belum melakukan pembayaran maka akan diberikan Surat Teguran I								Surat Teguran I	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran I	
6	Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
7	Jika dalam jangka waktu 7 hari belum melakukan pembayaran maka akan diberikan surat teguran 2								Surat Teguran 2	15 Menit	Tanda Terima Surat Teguran II	
8	Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti Prosedur Pembayaran								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
9	Setelah dilewatinya batas surat teguran kedua dalam jangka waktu 7 hari, wajib pajak masih belum melakukan pelunasan tunggakan pajak maka akan dilakukan pemasangan pengumuman atau peringatan di wilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa								Pemasangan pengumuman atau peringatan di wilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa	30 Menit	Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk, stiker maupun iklan media massa	
10	Jika Wajib Pajak melakukan Pelunasan maka pengumuman atau peringatan di wilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa akan dicabut oleh Tim Pemasangan Spanduk								Pencabutan pengumuman atau peringatan di wilayah Objek Pajak Berupa Spanduk, Stiker maupun iklan di media massa	30 Menit	Bukti Foto Dokumentasi Pemasangan Spanduk, stiker maupun iklan media massa	
11	Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan maka akan diserahkan Kepada JPU Juru Sita untuk dilanjutkan dengan penagihan seketika atau sekaligus/Penagihan Paksa								Berita Acara Kelengkapan Data Penagihan	10 Menit	Berita Acara Serah Terima	
12	Jika Wajib Pajak Belum Melakukan Pelunasan maka Juru Sita akan memberikan Surat Paksa berupa Perintah pelunasan utang pajak kepada Wajib Pajak								Surat Paksa sekurang-kurangnya memuat: nama wajib pajak, dasar penagihan dan besaran utang pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Paksa	
13	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti prosedur pembayaran								SOP Pembayaran	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
14	Jika Tidak melunasi setelah jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa diterima maka akan diterbitkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Objek Pajak								Surat Perintah melaksanakan Penyitaan Objek Pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Perintah	
15	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti prosedur pembayaran, dan Juru Sita akan menerbitkan Surat Pencabutan Sita								SOP Pembayaran, dan akan melakukan Pencabutan Sita	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
16	Jika Tidak Setelah dilakukan Penyitaan, Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak tertunggak sejak 14 hari lewat sejak Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dikeluarkan, Maka akan diajukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara								Mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara	15 Menit	Tanda Terima Pengajuan Pelelangan	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Wajib Pajak	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Pihak Ketiga/Kejaksaan Negeri	Tim Pemasangan Spanduk	Juru Sita	KPKNL	Kelengkapan	Waktu		Output
17	Jika Wajib Pajak melakukan pembayaran maka Wajib Pajak mengikuti prosedur pembayaran, dan Juru Sita akan menerbitkan Surat Pencabutan Sita	↓ □							SOP Pembayaran, dan akan melakukan Pencabutan Sita	Setiap hari kerja	Realisasi Pembayaran Pajak	
18	Jika Tidak. Setelah dilakukan Penyitaan, Wajib Pajak belum melunasi jumlah pajak terutang sejak 14 hari lewat sejak Surat Perintah melaksanakan Penyitaan dikeluarkan, Maka akan diajukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara		◇				→ □	Mengajukan pelelangan kepada Kantor Lelang Negara	15 Menit	Tanda Terima Pengajuan Pelelangan		
19	Pejabat berwenang yang ditunjuk mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara						↓ □	Walikota/Kepala Bapenda mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara	15 Menit	Surat Pengajuan Lelang		
20	Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak	□ →					↓ □	Surat Pemberitahuan pelaksanaan Pelelangan kepada Wajib Pajak	15 Menit	Tanda Terima Surat Pemberitahuan		

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAMI

**RAJA AZMAN SYAMA**

Ferbin Usama Muda  
NIP. 19701120 200003 1 009



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

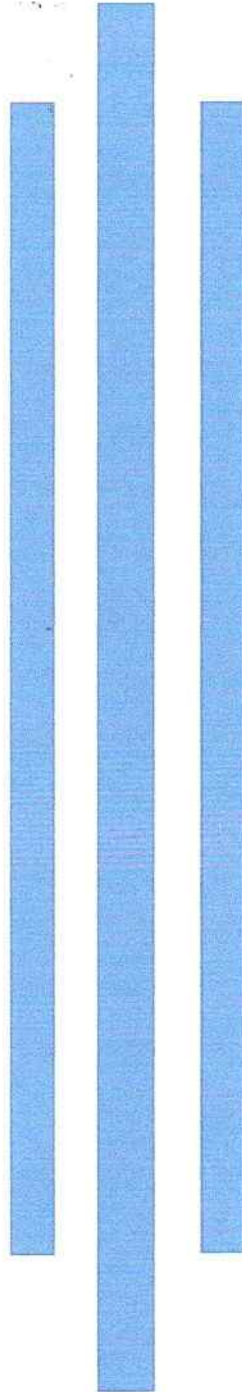
**BATAM**

---

***STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)***



**PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH**

NOMOR : ~~685~~/000.8.3.3/VII/2024



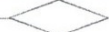







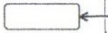


**TAHUN 2024**



  <b>PEMERINTAH KOTA BATAM</b> <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	No. SOP	: 6875/000.8.3.3/VII/2024
	Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2024
	Tanggal Revisi	: 01 JULI 2024
	Tanggal Pengesahan	: 01 JULI 2024
	Disahkan oleh	<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH</b> <b>KOTA BATAM</b>  <b>RAJA AZMANSYAH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	<b>SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH</b>	
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pemberian Pengurangan Pokok Piutang, Serta Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Keringanan Pokok Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Daerah</li> <li>Peraturan Walikota Batam Nomor 194 Tahun 2023 tentang tata cara penghapusan piutang Pajak Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>SLTA/Diploma/Strata</li> <li>Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li> <li>Memiliki pengetahuan bidang perpajakan</li> </ol>	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Data Piutang diatas 5 tahun</li> <li>Kebijakan Penghapusan Perpajakan Daerah</li> <li>Neraca Piutang Pajak</li> <li>Rekomendasi DPRD Kota Batam untuk nominal &gt; 5 Miliar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tim Penghapusan Pajak Daerah Kota Batam</li> <li>Data Piutang Pajak yang sudah Kadaluarsa</li> <li>Keputusan Walikota Batam tentang Penghapusan Pajak Daerah</li> </ol>	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>	
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Penghapusan piutang pajak daluarsa merupakan perintah perundang undangan	



 <b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>		6875000.8.3.3/VII/2024	Tanggal Efektif: 01 JULI 2024	SOP PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH								Halaman: 1/1
No	Uraian Prosedur	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Staf	Kepala Sub. Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Kepala Badan	Tim Peneliti Penghapusan Piutang	Walikota	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Rekapitulasi Piutang pajak & Usia Piutang > 5 Tahun							a. Data Piutang Pajak: daluarsa & > 5 tahun. b. Kebijakan Penghapusan Piutang Pajak Daerah. c. Neraca Piutang Pajak Daerah.	10 Hari Kerja	Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah dan piutang pajak yang daluarsa		
2	Rapat Koordinasi pembentukan Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang akan ditetapkan oleh Walikota							Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah	2 Hari Kerja	Surat Tugas Tim Peneliti Penghapusan Piutang Pajak Daerah		
3	Verifikasi awal data tentang piutang Pajak dan piutang pajak daluarsa							Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah dan piutang pajak yang daluarsa	2 Hari Kerja	Potensi dan analisa Piutang pajak daerah		
4	Rapat proses data piutang pajak daluarsa yang akan dihapuskan dan merumuskan draft KPTS Walikota beserta lampirannya, dan menyampaikan usulan penghapusan kepada Kepala Badan							Data Piutang Pajak yang daluarsa	5 Hari Kerja	Usulan Penghapusan Piutang Pajak, draft KPTS penghapusan piutang pajak		
5	Mendeliti berkas permohonan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah							Usulan Penghapusan Piutang Pajak	30 Menit	Nota Dinas kepada Walikota tentang Penghapusan Piutang		
6	Mengusulkan kepada Walikota untuk ditetapkan dalam KPTS penghapusan piutang pajak daerah							Usulan Penghapusan Piutang Pajak	30 Menit	Surat Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah		
7	Menyesuaikan data perubahan sebagaimana KPTS Walikota tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah							Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah	2 hari Kerja	Validasi piutang pajak daerah		
8	Arsip							Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang pajak daerah	1 Hari	Data Piutang Pajak		

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM



**RAJA AZMANSYAH**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701120 200003 1 009



**PEMERINTAH KOTA BATAM**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. Raja Isa No. 17 - Kantor Dinas Bersama Pemko Batam TELP. (0778) 470670, 470671, 470672 FAX. (0778) 470673  
website: <https://Bapenda.batam.go.id/> email: [Bapenda@batam.go.id](mailto:Bapenda@batam.go.id)

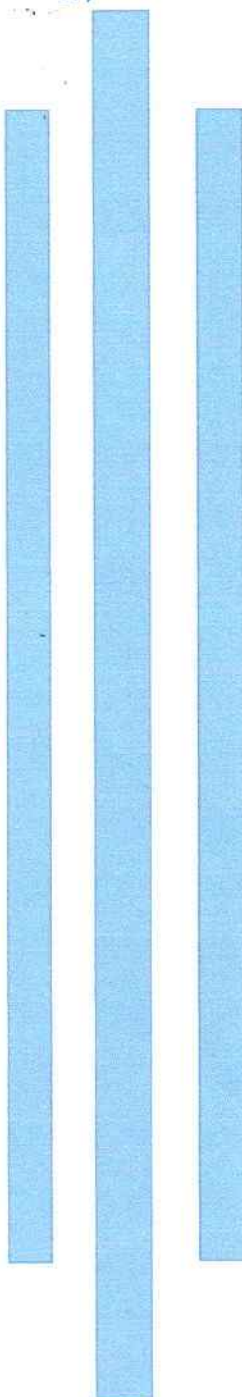
**BATAM**

---

**STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)**

**SUB BIDANG PENYELESAIAN PIUTANG**


NOMOR : 6873 /000.8.3.3/VII/2024



**TAHUN 2024**



**PEMERINTAH KOTA BATAM  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

No. SOP	: 0973/000.8.3.3/VII/2024
Tanggal Pembuatan	: 20 FEBRUARI 2024
Tanggal Revisi	: 01 JULI 2024
Tanggal Pengesahan	: 01 JULI 2024
Disahkan oleh	<b>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATAM</b>   <b>RAJA AZMANSYAH</b> Pembina Utama Muda NIP. 19701120 2000003 1 009
Nama SOP	<b>SOP SUB BIDANG PENYELESAIAN PIUTANG</b>

<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</li><li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>3. Permenkeu nomor 69/PMK.06/2014 tentang Kualitas Piutang dan pembentukan Penyisihan Piutang tidak tertagih pada kementerian negara/lembaga dan Bendahara Umum Negara</li><li>4. Peraturan Dirjen Pajak : No.Per-01/PJ/2020 tentang Penggolongan Kulit Piutang Pajak dan tata cara penghitungan penyisihan piutang pajak</li><li>5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 01 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li><li>6. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan</li><li>7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 194 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah</li><li>8. Peraturan Walikota Batam Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batam Nomor 48 Tahun</li><li>9. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Perubahan Nomenklatur BPPRD menjadi Bapenda</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SLTA/Diploma/Strata</li><li>2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer</li><li>3. Memiliki pengetahuan bidang perpajakan</li></ol>
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan Verifikasi Piutang</li><li>2. Berita Acara Verifikasi Piutang</li><li>3. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah</li><li>4. SOP Surat Keluar</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Laporan</li><li>2. Laporan Piutang Tahunan</li><li>3. Laporan Verifikasi Piutang</li></ol>
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>
Jika rangkaian SOP tidak dijalankan akan mengakibatkan target Piutang yang telah ditetapkan tidak tercapai.	Laporan Rekapitulasi Piutang dan Berita Acara Piutang





SOP SUB BIDANG PENYELESAIAN PIUTANG

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Kedengkapan	Mutu Baku	Output	Keterangan
		Staf	Kepala Sub Bidang Penyelesaian Piutang	Kepala Bidang Pembukuan Pendapatan Daerah	Wajib Pajak				
1	Rekapitulasi Laporan Piutang Pajak Daerah					a. Data Ketetapan Pajak Daerah, b. Laporan Piutang Pajak Daerah	10 Hari Kerja	Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	
2	Verifikasi ketepatan Piutang Pajak Daerah					Rekapitulasi Data Rincian Piutang Pajak Daerah	22,5 Jam	Potensi dan Kualitas Piutang Daerah	
3	Penentuan Prioritas Penagihan Piutang Pajak Daerah					Data Potensi dan Kualitas Piutang Pajak Daerah	75 Jam	Laporan Rincian Piutang Pajak Daerah Berdasarkan Kategori/ Kualifikasi Piutang	
4	Melakukan Verifikasi Piutang di Lapangan					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	30 Menit	a. Berita Acara Penagihan b. Data Rincian Piutang Pajak Daerah c. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
5	Melakukan Proses Penyelesaian Piutang Pajak Daerah					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	7 Hari Kerja	a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	
6	Arsip					a. Laporan Penagihan b. Berita Acara Penagihan c. Data Rincian Piutang Pajak Daerah d. Berita Acara Verifikasi Lapangan	1 Hari	Laporan Rincian Piutang	

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BATAM

**RAMA AZMAN SYAH**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19701120 200003 1 009